

**REKONTRUKSI KEWENANGAN TNI
DALAM MENGATASI TERORISME
DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL (*CIVIL SOCIETY*)
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis wewenang TNI dan kelemahan-kelemahan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia saat ini, serta merekonstruksi wewenang TNI dalam mengatasi terorisme secara proporsional dalam perspektif masyarakat sipil berbasis kepastian hukum dan keadilan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, sistem hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data penelitian diperoleh dari data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemukan: 1). TNI belum dapat terlibat secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena perumusan terorisme sebagai tindak pidana menimbulkan konsekuensi penanggulangan terorisme berada dalam koridor penegakan hukum, yang menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Peran TNI dalam proses penanganan aksi terorisme tetap didasari pada kebijakan dan keputusan politik negara sebagai wujud supremasi sipil. 2). Kelemahan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor substansi hukum yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan belum terdapat harmonisasi hukum dan terkonsep secara terstruktur dan terintegrasi. Faktor struktur hukum, pemahaman yang keliru dengan mengdikotomikan peran TNI sebagai pertahanan negara dan peran Polri dalam menjaga keamanan negara, karena belum terstruktur dan terintegrasi aktor keamanan dalam suatu konsep “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Budaya hukum TNI yang cenderung militeristik masih menjadi hambatan keterlibatan TNI secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena adanya asumsi berpotensi terjadinya pelanggaran Hak-hak masyarakat sipil. 3). Rekonstruksi wewenang TNI dalam menanggulangi terorisme dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan berdasarkan rasionalitas dengan melaksanakan konformitas berbagai kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum terkait pelaksanaan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme. Prinsip konformitas dapat dilakukan dengan merumuskan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, yang meliputi: a. Pelibatan TNI berdasarkan pendekatan berbasis peristiwa, seperti : aksi terorisme di dalam Kapal, Pesawat dll. B. Pendekatan skala ancaman atau dalam keadaan level krisis. c. Pelaksanaan tugas bantuan TNI dalam keadaan di bawah level krisis terjadi atas permintaan Polri. D. Pelibatan TNI bersifat BKO atau dibawah kendali operasi Polri. e. Pelibatan TNI bersifat sementara dan terbatas pada keadaan level krisis.

Kata Kunci : Rekontruksi, Kewenangan TNI, Terorisme, Masyarakat Sipil, Kepastian Hukum dan Keadilan.

**RECONSTRUCTION OF TNI AUTHORITY IN COUNTERING TERRORISM
WITH IN CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE
OF LAW CERTAINTY AND JUSTICE BASED**

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the authority of TNI and the weaknesses of having authority by TNI in countering terrorism in Indonesia today, also to reconstruct the authority of TNI in overcoming terrorism proportionally in a civil society perspective in certainty of law and justice based. This study is normative legal research, adopted a regulations, historical, legal system, and law comparative method. The source of data was obtained from secondary data, either legal matters consisting of primary data matter, secondary and tertiary ones. In data analysis, this research uses descriptive analysis. This research then found such as : 1). TNI institute can not involve directly yet to countering the terrorism due to formulation of terrorism as a criminal action remarked a consequence of countering terrorism is in corridor of law enforcement, there required the criminal trial system to work out. The role of TNI in process of countering terrorism is persistently based on a state political decision and policya as existing civil supremacy. 2) weakness in authority of TNI in countering terrorism is influenced by at least 3 (three) factors, they are : legal substance factor ruling the defense and security system seen not harmonious in legal yet and the concept is made structured and integrated. The legal structure factor, failure to understand then dichotomy the role of TNI as state defense and the role of Polri in safeguard state security, for it is not structured and integrated yet mainly the actor of safeguard security in a concept of “whole people do defense and security system”. Legal cultural to TNI tendency in militaristic seemly barrier of involvement TNI directly in countering the terrorism, due to available assumption potency occurrence violation to human rights of civil society. 3) Reconstruction to authority of TNI in countering terrorism can be done by applicable a justice principle bases rationality to execute conformity various interest in formulating legal policy related with implementing authority of TNI in countering terrorism. Conformity principle can be done by formulating certain criterions as standard point of involvement TNI in countering terrorism, covering : a). Involvement TNI conforms to occurrence based approach, such as: terrorism action in Ship, Plane, etc. b). Threat scale approach or in a critical level, c) Executing task with assistance of TNI under Police control operation lower critical level occurrence upon request by Polri, d) Involvement TNI is under police control operation, e). Involvement of TNI is temporary and limited on a critical level condition.

Keywords : Reconstruction, authority of TNI, Terrorism, Civil Society, Law Certainty and Justice